



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal **8 Juli 2025**

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2025



2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2021-2026

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Juli 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA BATAM



Dra. HASNAH
NIP. 196807141989092001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB IV PENUTUP.....	30
5.1 Catatan Penting.....	30
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	30
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II (bulan Mei) Tahun 2025.....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Triwulan II (bulan Mei) Tahun 2025.....	17
Tabel 3.1	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 7 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknik Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 207 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1075);

8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025
9. Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 7 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

4.2 Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2025

**2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II
Tahun 2025**

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Target kinerja sampai dengan akhir Desember 2025 dengan indikator program “Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” adalah 100%. Pencapaian kinerja dapat dijabarkan dengan realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ”Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi” adalah 53,57%, dari dari target 100%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan “Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah” adalah 71,43% dari target 100%. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ”Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan” adalah 0% dari target 100%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan “Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” adalah 50,00% dari target sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan “Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana” adalah 50,00% dari target 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

Target kinerja sampai dengan akhir Desember 2025 dengan indikator program “Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN” adalah 99,50%, Pencapaian kinerja dapat dijabarkan dengan realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ”Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Kompetensinya” adalah 81,94% dari target sebesar 98,94%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
- Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

3. Program Kepegawaian Daerah

Target kinerja sampai dengan akhir Desember 2025 dengan indikator program “Persentase Kasus Disiplin ASN yang Ditindaklanjuti” adalah 100%, Pencapaian kinerja dapat dijabarkan dengan realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ”Jumlah ASN yang Memenuhi Penilaian Kinerja” adalah 9.104 orang dari target 5.500 orang dan indikator kegiatan ”Persentase Kasus Disiplin ASN yang Diselesaikan” adalah 50,00% dari target 80,83%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Target kinerja sampai dengan akhir Desember 2025 dengan indikator program “Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikasi sesuai dengan Jabatan dan Kompetensinya” adalah 72,83%, Pencapaian kinerja dapat dijabarkan dengan realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan "Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional" adalah 12,56% dari target 15,22%. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

b) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan "Persentase ASN yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan" adalah 93,83% dari target sebesar 95,30%. Sedangkan pada indikator "Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS" adalah 0% dari target 100%. Kegiatan ini terdapat pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Belum adanya realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Kepegawaian Daerah

Target kinerja sampai dengan akhir Desember 2025 dengan indikator program "Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN" adalah 99,50%. Pencapaian kinerja dapat dijabarkan dengan realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan "Persentase ASN yang Telah Memutakhirkkan Data Kepegawaian" adalah 100% dari target 99,48%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
2. Program Kepegawaian Daerah

Target kinerja sampai dengan akhir Desember 2025 dengan indikator program “Persentase ASN yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan D-IV/S-1 Ke atas” adalah 80,42%. Pencapaian kinerja dapat dijabarkan dengan realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan “Jumlah ASN yang Memenuhi Kompetensi” adalah 88,06% dari target 83,03%. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Centre
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (Juni 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5.03	KEPEGAWAIAN					
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	68,99%	68,99%	Proses -nilai akhir(sifat indikator)
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	53,57%	53,57%	Proses -nilai akhir(sifat indikator)
5.03.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	57,14%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0 Dokumen	50,00%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	71,43%	71,43%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	-Selesai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (Juni 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
5.03.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	-Selesai
5.03.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	-Selesai
5.03.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	-Selesai
5.03.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen	50,00%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0 Laporan	50,00%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50,00%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	0%	0%	-Belum
5.03.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	0%	-Belum
5.03.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	0%	-Belum
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50,00%	50,00%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (Juni 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
5.03.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	50,00%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	50,00%	50,00%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	50,00%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	50,00%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	35 Unit	59,32%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	99,50%	90,97%	91,43%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkkan Data Kepegawaian	99,48%	100%	100,52%	-Proses -nilai akhir (sifat indikator)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (Juni 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
5.03.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	98,94%	81,94%	82,82%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	50,00%	-Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	-Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	-Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	80,42%	71,34%	85,92%	Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Memenuhi Kompetensi	83,03%	88,06%	106,03%	-Proses -nilai akhir (sifat indikator)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (Juni 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Centre	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%	-Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	9 Orang	9 Orang	50,00%	-Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	-Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Juml ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5.500 Orang	9.104 Orang	165,53%	-Proses -nilai akhir (sifat indikator)
		Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	80,83%	50,00%	61,86%	-Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	0 Laporan	0%	-Belum
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	18 Orang	0 Orang	0%	-Belum
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	55 Orang	4 Orang	7,27%	-Proses -nilai akhir (sifat indikator)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (Juni 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
5.04	PENDIDKAN DAN PELATIHAN					
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	72,83%	93,89%	98,52%	-Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	15,22%	12,56%	82,52%	-Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.04.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	375 Orang	316 Orang	84,27%	-Proses -nilai akhir (sifat indikator)
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	95,30%	93,83%	98,46%	-Proses -nilai akhir (sifat indikator)
		Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100%	0%	0%	-Belum
5.04.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	-Belum

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

*Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun Triwulan II (bulan Mei) Tahun 2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam*

NO	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 Triwulan II (Juni 2025)		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64.00%	Indeks	85,10	
2	Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian	Persentase	98.80%	Persentase	100%	
3	Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	Persentase	30.26%	Persentase	29,98%	
4	Persentase ASN Yang Memenuhi yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi	Persentase	33.74%	Persentase	55,12%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

1. Isu-Isu penting terkait Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi :
 - a. Kebutuhan pegawai semakin meningkat, namun tidak sejalan dengan persetujuan formasi yang diberikan oleh Kementerian

PANRB RI atas kebutuhan formasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Batam;

- b. Tingginya jumlah pegawai yang pensiun setiap tahun;
 - c. Peraturan perundang-undangan yang sering berubah-ubah dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh sehingga membuat pengambilan keputusan berkaitan kepegawaian pun selalu berubah-ubah;
 - d. Belum optimalnya harmonisasi kebijakan daerah terkait kebijakan penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit;
 - e. Adanya peluang pengisian formasi yang kurang melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. Isu-Isu penting terkait Bidang Pengembangan Aparatur :
 - a. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*);
 - b. Belum terpenuhinya kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kebijakan tugas belajar, ijin belajar dan kediklatan.
 3. Isu-Isu penting terkait Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi :
 - a. Mengupayakan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya melalui analisa jabatan dalam rangka pengembangan semangat kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas kerja.
 4. Isu-isu penting terkait Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur
 - a. Kurangnya kedisiplinan ASN ditandai tingginya kasus pelanggaran disiplin disebabkan pemahaman ASN terhadap aturan kepegawaian yang masih kurang;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Program Kepegawaian Daerah
 - a. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
 - b. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - c. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						22.165.290.530	23.143.389.736	978.099.206	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					22.165.290.530	23.143.389.736	978.099.206	
5.03	KEPEGAWAIAN	KEPEGAWAIAN					16.708.378.530	16.745.654.736	37.276.206	
5.03.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP PD	100%	71,10	14.080.277.130	14.499.774.838	419.497.708	
				Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		77,61				
5.03.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Percentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	13.234.714.680	13.992.407.838	757.693.158	
5.03.01 .2.02.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 Orang/bulan	55 Orang/bulan	13.234.714.680	13.948.657.838	713.943.158	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK
5.03.01 .2.02.0 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	0	43.750.000	43.750.000	Pembayaran Honorarium Bendahara

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
5.03.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran	100%	100%	554.711.450	215.112.000	-339.599.450	
5.03.01 .2.06.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.135.000	3.047.000	-3.088.000	Belanja Alat Listrik
5.03.01 .2.06.0 002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	111.910.000	63.947.000	-47.963.000	Belanja Barang Pakai Habis untuk Kegiatan Kantor (ATK, Bahan Komputer)
5.03.01 .2.06.0 004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.227.000	2.818.000	-11.409.000	Belanja Alat, Peralatan dan Bahan Kebersihan
5.03.01 .2.06.0 005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	55.049.450	24.499.000	-30.550.450	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8
5.03.01 .2.06.0 006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000	7.200.000	0	Belanja Koran
5.03.01 .2.06.0 008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000	7.200.000	-1.800.000	Belanja Konsumsi
5.03.01 .2.06.0 009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12 Laporan	351.190.000	106.401.000	-244.789.000	Perjalanan Dinas ASN
5.03.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	Percentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	100%	85.251.000	71.285.000	-13.966.000	
5.03.01 .2.07.0 005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	12.524.000	12.524.000	0	Belanja Kursi dan Meja Kerja
5.03.01 .2.07.0 006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	4 Unit	72.727.000	58.761.000	-13.966.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
5.03.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	5.040.000	2.520.000	-2.520.000	
5.03.01 .2.08.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.040.000	2.520.000	-2.520.000	Pengiriman Dokumen
5.03.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	200.560.000	218.450.000	17.890.000	
5.03.01 .2.09.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.540.000	40.380.000	-3.160.000	Pemeliharaan Kendaraan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
5.03.01 .2.09.0 002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	117.670.000	142.500.000	24.830.000	Pemeliharaan Kendaraan
5.03.01 .2.09.0 006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84 Unit	53 Unit	39.350.000	35.570.000	-3.780.000	Pemeliharaan Peralatan Kantor (Komputer, Printer, Laptop, dll)
5.03.0 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan D-IV/S-1, S-2 dan S-3	73,03 %	80,42 %	2.628.101.400	2.245.879.898	-382.221.502	
			Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	Persentase kasus disiplin ASN yang ditindaklanjuti	100%	100%				
			Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	Persentase pemutakhiran data ASN dan data penempatan ASN	92,55%	99,50%				
5.03.0 2.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepergawainan ASN	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepergawainan ASN	Persentase ASN yang telah memutakhirkan data kepegawaian	Persentase ASN yang telah memutakhirkan data kepegawaian	88,50%	99,48%	802.660.400	283.434.000	-519.226.400	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8
5.03.02 .2.01.0 002	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	649.168.000	223.723.000	-425.445.000	Pelaksanaan Penerimaan ASN
5.03.02 .2.01.0 010	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	153.492.400	59.711.000	-93.781.400	Sosialisasi Tentang Aplikasi SIMPEG
5.03.0 2.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	96.60%	98.94%	614.099.000	590.919.000	-23.180.000	
5.03.02 .2.02.0 001	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	19.295.000	13.600.000	-5.695.000	Pelaksanaan Kegiatan Mutasi dan Pelantikan
5.03.02 .2.02.0 002	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	188.875.000	137.263.000	-51.612.000	Pelaksanaan Kenaikan Pangkat ASN dan Penyesuaian Ijazah

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
5.03.02 .2.02.0 003	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	2 Dokumen	405.929.000	440.056.000	34.127.000	Pelaksanaan Promosi ASN
5.03.0 2.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Percentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	Percentase ASN yang memenuhi kompetensi	14,00%	83,05%	875.389.000	1.105.262.898	229.873.898	
5.03.02 .2.03.0 002	Pengelolaan Assessment Centre	Pengelolaan Assessment Centre	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5 Dokumen	1 Dokumen	260.389.000	265.262.898	4.873.898	Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
5.03.02 .2.03.0 004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	10 Orang	615.000.000	840.000.000	225.000.000	Pelaksanaan Tugas Belajar ASN
5.03.0 2.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	Percentase capaian penilaian kinerja dan evaluasi kinerja dalam penegakan disiplin dan pemberian penghargaan	5.500 Orang	98,25%	335.953.000	266.264.000	-69.689.000	
			Percentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan		80,83%					
5.03.02 .2.04.0 003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	43.145.000	32.281.000	-10.864.000	Pelaksanaan Sosialisasi Kinerja ASN
5.03.02 .2.04.0 004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	18 Orang	124 Orang	230.233.000	178.531.000	-51.702.000	Penilaian dan Pemberian Penghargaan ASN
5.03.02 .2.04.0 007	Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	55 Orang	55 Orang	62.575.000	55.452.000	-7.123.000	Pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan Disiplin ASN

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						5.456.912.000	6.397.735.000	940.823.000	
5.04.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi sesuai dengan jabatan dan kompetensinya	72,83%	95,30%	5.456.912.000	6.397.735.000	940.823.000	
5.04.0 2.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	*Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	14,00%	15,22%	1.610.296.000	2.983.077.000	1.372.781.000	
5.04.02 .2.01.0 003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400 Orang	375 Orang	1.610.296.000	2.983.077.000	1.372.781.000	Pelasanaan Bimtek ASN

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
5.04.0 2.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	58,90%	95,30%	3.846.616.000	3.414.658.000	-431.958.000	
			Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100%	100%				
5.04.02 .2.01.0 007	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	2 Laporan	3.846.616.000	3.414.658.000	-431.958.000	Pelaksanaan Dilkat PIM dan Latsar CPNS

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
					JUMLAH	22.165.290.530	23.143.389.736	978.099.206		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

5.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD